

SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

"Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan"
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN MUNJUL

Oleh :

Sarmanah^a, Agus Lukman Hakim^b

Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

^aadninaulia28@gmail.com, ^baguslukman091@yahoo.com

ABSTRAK

Banjir yang sering melanda Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program penanggulangan banjir yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, masyarakat terdampak, serta analisis terhadap dokumen kebijakan dan program yang telah dijalankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai program seperti pembangunan infrastruktur drainase, pembangunan tanggul, dan sistem peringatan dini telah berhasil mengurangi frekuensi banjir, efektivitasnya masih terbatas. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana, serta ketidakteraturan dalam sistem monitoring dan evaluasi program. Hal ini menyebabkan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program penanggulangan banjir kurang optimal.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antar pihak terkait, terutama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa program penanggulangan banjir dapat berfungsi dengan lebih baik dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Kata Kunci:

Efektivitas, Program Penanggulangan Banjir, Koordinasi, Partisipasi Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi.

ABSTRACT

Floods are frequent natural disasters in the Munjul District, Pandeglang Regency, causing significant economic and social impacts on the local community. This study aims to evaluate the effectiveness of flood mitigation programs implemented by the local government. Using a qualitative descriptive

SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

approach, the research collects data through in-depth interviews with local government officials, affected communities, and analyzes related policy documents and programs that have been executed. The results indicate that although various programs such as the construction of drainage systems, embankments, and early warning systems have successfully reduced flood frequency, their effectiveness remains limited. Several challenges were identified, including inadequate coordination among relevant government agencies, low community participation in disaster mitigation activities, and irregular monitoring and evaluation systems. These factors hinder the sustainability and improvement of flood mitigation programs. This study recommends enhancing coordination between relevant stakeholders, particularly between the central government, local authorities, and communities. Furthermore, strengthening community participation in planning and implementing programs, as well as developing a more effective monitoring and evaluation system, is crucial to ensure that flood mitigation programs operate more efficiently and provide long-term positive impacts.

Keywords:

Effectiveness, Flood Mitigation Programs, Munjul District, Coordination, Community Participation, Monitoring and Evaluation.

PENDAHULUAN

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Di Indonesia, banjir telah menjadi masalah tahunan yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satu wilayah yang sering mengalami banjir adalah Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Tingginya curah hujan, kondisi geografis yang rendah, buruknya tata kelola drainase, serta alih fungsi lahan menjadi pemicu utama bencana tersebut. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan banjir, seperti pembangunan infrastruktur pengendali air dan edukasi kebencanaan, efektivitas dari program-program ini masih dipertanyakan, mengingat banjir masih terus terjadi dari tahun ke tahun.

Menurut (Dunn, 2003), efektivitas kebijakan publik dapat dilihat dari sejauh mana tujuan program tercapai dengan sumber daya yang tersedia secara efisien. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah program

penanggulangan banjir di Kecamatan Munjul benar-benar mampu mengurangi risiko banjir dan memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (Mahsun, 2006) juga menyatakan bahwa efektivitas merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja program pemerintah, yang perlu didukung dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat.

Salah satu permasalahan yang sering kali diabaikan adalah minimnya monitoring dan evaluasi program secara sistematis dan berkelanjutan. Tanpa adanya evaluasi yang menyeluruh, sulit untuk mengetahui apakah program yang dijalankan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang diinginkan. Hal ini berdampak pada keberlangsungan dan perbaikan program di masa mendatang.

Selain aspek teknis, pendekatan sosial juga memegang peran penting dalam keberhasilan penanggulangan bencana. (Wisner, 2004) menekankan bahwa kerentanan sosial masyarakat sering kali menjadi faktor utama yang memperparah dampak bencana. Oleh karena itu,

partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap manajemen risiko – dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi – merupakan kunci utama dalam menciptakan program yang efektif dan berkelanjutan.

Menurut (Arnstein, 1969) melalui teorinya “Ladder of Citizen Participation”, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan (UNDP, 2010) hanya soal keterlibatan simbolis, tetapi harus mencapai tingkat kemitraan dan kontrol masyarakat terhadap keputusan yang menyangkut mereka. Dalam konteks kebencanaan, masyarakat lokal memiliki pengetahuan kontekstual yang sangat penting dan harus diberdayakan sebagai subjek, bukan sekadar objek program.

Lebih lanjut, (UNDP, 2010) juga menegaskan bahwa keberhasilan strategi penanggulangan bencana sangat tergantung pada pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan Permenkes No. 75 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, agar tercipta sistem yang tanggap dan adaptif.

Dalam konteks kebencanaan, (UNDP, 2010) juga menekankan bahwa penanggulangan bencana yang efektif memerlukan keterlibatan masyarakat secara utuh, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (Wisner, 2004) bahkan menggarisbawahi bahwa kerentanan masyarakat terhadap bencana lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik, bukan hanya aspek fisik atau alamiah semata.

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada evaluasi efektivitas program penanggulangan banjir di Kecamatan Munjul, dengan penekanan pada dua aspek utama, yaitu:

Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi program selama ini dilakukan, dan sejauh mana hasilnya digunakan untuk perbaikan program; serta

Bagaimana partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dilibatkan dalam proses penanggulangan banjir.

Dalam konteks lokal, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah berupaya melalui pembangunan fisik dan kegiatan non-fisik seperti simulasi bencana, penyuluhan, dan pembentukan kelompok siaga bencana. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan, khususnya dalam hal efektivitas pelaksanaan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan kajian terhadap efektivitas program penanggulangan banjir di Kecamatan Munjul, dengan menilai sejauh mana tujuan program tercapai, kendala yang dihadapi, dan bagaimana peran masyarakat berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan program. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk penguatan kebijakan lokal dalam menghadapi tantangan bencana banjir yang semakin kompleks. Dengan mengeksplorasi kedua aspek ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan program yang ada, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pengurangan risiko secara nyata di tingkat lokal.

PEMBAHASAN

1. Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Banjir

Monitoring dan evaluasi (*monev*) merupakan komponen penting dalam siklus kebijakan publik. Tanpa adanya evaluasi,

sulit untuk mengukur sejauh mana tujuan program tercapai dan apakah program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan yang ada. Dalam konteks Kecamatan Munjul, pelaksanaan program penanggulangan banjir tampaknya masih kurang ditopang oleh sistem monev yang kuat dan berbasis data. Evaluasi sering kali dilakukan secara internal dan administratif, lebih bersifat formalitas laporan, dan belum menyentuh dimensi kualitas program atau dampaknya secara langsung terhadap masyarakat.

Menurut (Rondinelli, 1993), keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kejelasan indikator, pengukuran hasil yang obyektif, serta mekanisme evaluasi yang partisipatif. Di Munjul, hasil observasi lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa belum ada indikator kinerja yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan program penanggulangan banjir. Hal ini menyebabkan penilaian terhadap keberhasilan program hanya berpatokan pada jumlah kegiatan yang terlaksana (*input-output*), bukan pada perubahan kondisi masyarakat atau pengurangan risiko banjir (*outcome-impact*).

Lebih lanjut, (Hatr, 2006) menyatakan bahwa evaluasi yang efektif harus mampu menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Apakah program dilaksanakan sesuai rencana? (2) Apakah program mencapai targetnya? dan (3) Apakah program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat? Ketiga pertanyaan ini jarang dijawab secara komprehensif dalam pelaksanaan monev di level kecamatan atau desa.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam hal perencanaan dan pelaporan menjadi faktor penyumbang lemahnya monev. Aparatur pemerintah desa dan kecamatan tidak selalu memiliki kemampuan teknis dalam menyusun

logframe, indikator SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely*), atau sistem evaluasi berbasis data lapangan. Akibatnya, program penanggulangan banjir kerap kali hanya bersifat reaktif, tidak berbasis evaluasi berkelanjutan, dan tidak mendorong pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan pandangan (William, 2003), yang menekankan pentingnya evaluasi kebijakan sebagai upaya untuk menilai dampak kebijakan publik terhadap masalah sosial secara objektif. Ia menggarisbawahi bahwa evaluasi harus menjadi proses reflektif dan adaptif, bukan hanya alat kontrol administratif.

Untuk memperkuat efektivitas program di Munjul, maka evaluasi tidak boleh hanya menjadi kegiatan akhir proyek, melainkan bagian dari siklus kebijakan secara menyeluruh (*ex-ante, ongoing, and ex-post evaluation*). Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dilakukan benar-benar mampu menurunkan tingkat risiko banjir, dan bukan sekadar membangun infrastruktur fisik tanpa jaminan keberlanjutan.

2. Partisipasi Masyarakat dan Pelibatan Kelompok Rentan

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam manajemen risiko bencana. Dalam konteks penanggulangan banjir di Kecamatan Munjul, partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pelibatan kelompok rentan. Program-program yang ada lebih banyak dijalankan oleh aparat pemerintah bersama kelompok-kelompok terorganisasi (seperti karang taruna atau aparat desa), sementara warga dari kelompok lansia, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin belum dilibatkan secara aktif.

Menurut (Arnstein, 1969) dalam teorinya *Ladder of Citizen Participation*, terdapat tingkatan dalam pelibatan masyarakat, dari manipulasi hingga kontrol masyarakat. Sebagian besar program penanggulangan banjir di Munjul tampaknya masih berada pada level “tokenism” – di mana masyarakat hanya diberi informasi atau diajak konsultasi, namun belum memiliki kontrol atas keputusan. Ini berisiko membuat program tidak sensitif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat, terutama mereka yang paling terdampak.

Partisipasi yang rendah juga berkaitan dengan kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) antara pemerintah dan masyarakat. (Chambers, 1997) dalam gagasannya tentang *Participatory Rural Appraisal* (PRA) menyatakan bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan kontekstual yang berharga dan tidak boleh dikesampingkan dalam perencanaan program. Oleh karena itu, pelibatan aktif masyarakat tidak hanya penting dari sisi moral, tetapi juga strategis karena menjamin keberlanjutan program.

Pelibatan kelompok rentan penting karena mereka memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap bencana. (Wisner, 2004) dalam kerangka Pressure and Release Model menyatakan bahwa bencana bukan hanya akibat bahaya alamiah, tetapi juga karena kerentanan sosial yang tidak dikurangi. Jika kelompok rentan tidak dilibatkan, maka akar dari kerentanan ini tidak akan tersentuh oleh kebijakan.

Sementara itu, (UNDP, 2010) juga menyebutkan bahwa program penanggulangan bencana yang tidak inklusif cenderung gagal karena tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas (community-based disaster risk reduction/ CBDRR) menjadi solusi yang diusulkan untuk meningkatkan

efektivitas program melalui pelibatan warga secara menyeluruh dan demokratis.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa dalam kegiatan edukasi atau pelatihan kebencanaan, materi sering kali disampaikan dengan pendekatan teknokratik yang sulit dipahami oleh warga. Belum ada pendekatan edukasi yang mempertimbangkan keragaman latar belakang sosial, tingkat pendidikan, atau bahkan bahasa lokal. Ini menjadi penghambat partisipasi yang bermakna.

Dengan demikian, pelibatan masyarakat – khususnya kelompok rentan – perlu ditingkatkan melalui pendekatan inklusif, berbasis budaya lokal, serta membuka ruang dialog dua arah antara pemerintah dan warga. Kegiatan seperti musyawarah kampung kebencanaan, pelatihan berbasis kelompok RT/RW, atau forum warga perempuan dan disabilitas dalam kebencanaan bisa menjadi alternatif yang layak dikembangkan.

Kesimpulan Sementara Pembahasan

Sistem evaluasi program penanggulangan banjir di Kecamatan Munjul masih lemah, tidak berbasis indikator yang terukur, dan belum menjadi alat perbaikan kebijakan. Partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan, belum optimal sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara program yang dirancang dengan kebutuhan lapangan.

Dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif serta pendekatan yang lebih inklusif dalam melibatkan masyarakat pada semua tahapan kebijakan penanggulangan banjir.

SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

"Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan"
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Ide Pokok Pembahasan

| Subtopik | Ide Pokok |
|---|---|
| 1. Monitoring dan Evaluasi Program | Proses evaluasi program banjir di Munjul masih lemah, tidak berbasis indikator kinerja yang terukur, dan belum digunakan sebagai dasar perbaikan. |
| 2. Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan | Pelibatan masyarakat, khususnya kelompok rentan, masih minim sehingga program kurang inklusif dan belum menjawab kebutuhan spesifik masyarakat |

PENUTUP dan REKOMENDASI

Penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, memerlukan evaluasi dan perbaikan yang menyeluruh, baik dari segi kebijakan, pelaksanaan, maupun partisipasi masyarakat. Dengan memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data, serta melibatkan lebih banyak kelompok rentan dalam setiap tahap program, diharapkan bencana banjir dapat diminimalisasi dampaknya, dan masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi bencana yang ada.

Berdasarkan pembahasan mengenai efektivitas program penanggulangan banjir di Kecamatan Munjul, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Monitoring dan Evaluasi Program yang Lemah

Program penanggulangan banjir yang dilaksanakan di Kecamatan Munjul masih kurang didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang efektif. Banyak kegiatan yang dilaksanakan tanpa indikator kinerja yang jelas dan terukur. Proses evaluasi cenderung

bersifat administratif tanpa pemanfaatan data lapangan untuk perbaikan kebijakan. Keberhasilan program tidak diukur berdasarkan dampaknya terhadap pengurangan risiko banjir, melainkan hanya berdasarkan pada pelaksanaan fisik dan kegiatan administratif.

2. Minimnya Partisipasi Masyarakat, Terutama Kelompok Rentan

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir masih sangat terbatas. Masyarakat cenderung hanya dilibatkan dalam kegiatan yang sifatnya pasif, seperti menerima informasi atau mengikuti sosialisasi. Kelompok rentan, seperti perempuan, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, belum dilibatkan secara signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan banjir. Hal ini menyebabkan program sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, terutama kelompok yang paling terdampak.

3. Kebutuhan Pendekatan Inklusif dan Berbasis Data

Program penanggulangan banjir di Kecamatan Munjul perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara aktif, terutama kelompok rentan. Selain itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang lebih kuat untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan banjir di Kecamatan Munjul:

1. Perbaikan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Pemerintah Kecamatan Munjul perlu mengembangkan sistem monev berbasis data yang lebih transparan dan partisipatif. Program penanggulangan banjir harus disertai dengan indikator yang jelas dan terukur, serta dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana program mencapai tujuannya.

Monev juga perlu melibatkan masyarakat, terutama pada tahap evaluasi, sehingga feedback dari mereka dapat digunakan untuk perbaikan program di masa depan. Penggunaan indeks risiko banjir yang lebih objektif dan terukur dapat menjadi alat bantu dalam evaluasi efektivitas.

2. Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Pemerintah harus memperkenalkan pendekatan berbasis masyarakat atau *Community-Based Disaster Risk Reduction (CBDRR)* dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan penanggulangan banjir.

Musyawarah warga secara rutin, forum dialog antar kelompok rentan, serta pelibatan perempuan dalam posisi kunci dalam pengambilan keputusan kebencanaan adalah langkah yang harus diambil.

3. Pelatihan dan Pendidikan Kebencanaan yang Inklusif

Pelatihan kebencanaan perlu lebih bersifat inklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan. Misalnya, penyuluhan khusus untuk perempuan kepala keluarga, lansia, serta penyandang disabilitas mengenai cara

evakuasi yang aman dan bagaimana menghadapi situasi darurat.

Program edukasi kebencanaan sebaiknya menggunakan metode yang mudah dipahami dan menyentuh kehidupan sehari-hari, misalnya dengan melibatkan para tokoh masyarakat setempat yang dipercaya oleh warga dalam penyampaian materi.

4. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Lokal

Aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa perlu dilatih dalam hal perencanaan risiko bencana dan manajemen program kebencanaan yang berbasis data. Pelatihan ini dapat mencakup penyusunan logframe, teknik monitoring dan evaluasi, serta analisis risiko bencana berbasis partisipasi masyarakat.

Penyusunan anggaran penanggulangan bencana harus berbasis pada hasil evaluasi dan pemetaan risiko yang lebih akurat, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat lebih tepat sasaran.

5. Membangun Infrastruktur yang Tahan Bencana

Pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir, seperti tanggul dan saluran drainase, perlu didasarkan pada kajian lingkungan dan risiko bencana yang matang. Selain itu, infrastruktur yang dibangun harus terjangkau, dapat dipelihara dengan baik oleh masyarakat, dan dilengkapi dengan sistem peringatan dini yang efektif.

6. Pendekatan Terpadu antara Pemerintah dan Masyarakat

Kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat setempat harus diperkuat melalui forum kolaboratif yang memungkinkan tukar informasi secara langsung. Dengan pendekatan pentahelix (melibatkan masyarakat, pemerintah,

akademisi, dunia usaha, dan media), program penanggulangan banjir dapat lebih komprehensif dan berdampak positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Hatry, H. P. (2006). *Performance Measurement: Getting Results*. The Urban Institute Press.
- Mahsun, M. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rondinelli, D. A. (1993). *Development Projects as Policy Experiments: An Adaptive Approach to Development Administration*. Routledge.
- UNDP. (2010). *Disaster Risk Reduction: A Participatory Approach*. UNDP (United Nations Development Programme).
- William, D. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Pearson Education.
- Wisner, B. B. (2004). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability, and Disasters*. Routledge.